

# “GoSuJo” sebagai Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja *Public Service* oleh Aparatur Desa Sumberjo Sanankulon Blitar

<sup>1</sup>Firdausi Dhulhijjahyani, <sup>2</sup>Devina Safira Prastowo, <sup>3</sup>Hafidah Putri Pangestu, <sup>4</sup>Dini Putri Ratna Meritasari, <sup>5</sup>Sri Untari

<sup>1,2,3,4,5</sup> Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang  
Corresponding Author. Email : devisafirap@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received : 09-08-2024  
Revised : 20-08-2024  
Accepted : 26-08-2024  
Online : 29-08-2024

### Keywords:

Public service;  
Good Governance;  
Pengembangan website



## ABSTRACT

**Abstract:** *Good governance is a reform agenda that aims to create good and clean government. The aim of this community service is to increase the capacity of village officials to provide excellent public services. The method used is a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach with 5 stages, namely initial socialization, initial planning, program preparation, implementation and evaluation. The result of the service carried out by the service team is the GoSuJo website which will be used to provide online services and open information to the people of Sumberjo Village.*

**Abstrak:** Pemerintahan yang terlaksana dengan baik (*good governance*) adalah agenda reformasi yang bertujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik terbaik. Metode yang digunakan dengan pendekatan *Partisipatory Rural Appraisal* (PRA) dengan 5 tahapan yakni sosialisasi awal, perencanaan awal, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian adanya website Gosujo yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan secara *online* serta keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Sumberjo.



<https://doi.org/10.31764/justek.vXiY.ZZZ>



This is an open access article under the *CC-BY-SA* license

## A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan poin penting yang digunakan untuk terbentuknya pemerintah yang bersih juga baik (*good clean governance*). Peraturan menteri PNN No.3 Tahun 2023 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahan (Pramudita et al., 2024). Konsep *good governance* sejatinya telah lama dilaksanakan, namun implementasinya masih tidak sesuai kaidahnya

dalam pemahaman konsep *governance*. Singkatnya banyak pihak mengartikan bahwa *governance* hanya sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan yang dimaksudkan tidak sekedar struktur dan manajemen lembaga tetapi *private sector* dan *civil society* adalah aktor penting dalam pelaksanaan *governance* (Adam et al., 2021)

Pelayanan merupakan tugas pokok penting dari aparatur atau birokrat sebagai pribadi yang mengabdikan kepada negara dan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat (Ikbal et al., 2023) Penyelenggara pelayanan publik atau public service terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah pemerintahan desa (Santati et al., 2022). Kegiatan pemerintah desa memerlukan sebuah sistem yang mencatat secara rinci dan merekam segala aktivitas pemerintahan dengan tujuan mendokumentasikan berbagai kejadian dan aktivitas yang telah berlangsung melalui catatan dalam format tertentu. Pelayanan kepada warga perlu diperhatikan untuk memudahkan warga dalam mengurus berbagai dokumen penting seperti sertifikat tanah, pengalihan nama, pembuatan kartu penduduk dan dokumen-dokumen lainnya (Pujiyono et al., 2023).

Tata kelola pemerintahan yang baik saat ini menjadi bagian penting dalam pembangunan birokrasi di masa depan, karena tantangan penerapan prinsip tata kelola yang baik adalah dengan menyediakan mekanisme dan pedoman yang mewujudkan pemangku kepentingan mencapai keseimbangan dalam memenuhi kepentingannya. Pelayanan merupakan aspek krusial dalam sebuah instansi pemerintahan yang menjadi garda terdepan yang harus diperhatikan dalam komunikasi dan hubungan dengan masyarakat. Dalam kinerja sektor publik, tidak dapat dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik. Pelayanan menjadi "nilai" sebuah instansi pemerintahan karena tujuan dari adanya instansi tersebut adalah untuk menyediakan kualitas public service yang baik. (Kamelia & Veranita, 2022).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan good governance harus selaras dengan luasnya wawasan serta pendidikan masyarakat. Tuntutan tersebut harus diwujudkan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai perbaikan untuk mencapai good governance yang menciptakan peningkatan kualitas public service (Kamelia & Veranita, 2022). Ada sembilan aspek fundamental yang disebutkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengenai pengamalan good governance yaitu: 1) partisipasi, keikutsertaan warga dalam memutuskan sesuatu, baik langsung ataupun tidak; 2) penegakan hukum, yang merupakan konteks hukum yang diimplementasikan secara adil serta tidak pandang bulu; 3) transparansi, laporan pemerintah dikelola secara terbuka kepada publik; 4) responsif, yaitu penengah ketika terdapat perbedaan kepentingan guna mencapai mufakat untuk kebermanfaatannya bersama; 5) konsensus, good governance berperan sebagai penghubung kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas; 6)

equality atau kesamaan yang menjadi kesempatan bagi semua warga tanpa membeda-bedakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri; 7) efektivitas dan efisiensi yaitu negara memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan tepat; 8) akuntabilitas, berani bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi; 9) visi yang strategis, dimana seorang pemimpin harus memiliki pemikiran kedepan untuk kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang (Cahyadi, 2016)

Penyelenggara public service yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dalam sektor pelayanan masih memperlihatkan kinerja yang jauh dari harapan masyarakat. Permasalahan yang dianggap sepele tetapi sejatinya masih sering ditemui dalam public service antara lain seperti prosedur pelayanan yang terkesan bertele-tele, praktek calo, waktu yang diberikan tidak terang dan lain sebagainya menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dalam pelayanan instansi. (Kamelia & Veranita, 2022). Problematika yang rumit dimana menjadi akibat dari permasalahan public service belum dirasakan eksistensinya oleh rakyat (Widanti, 2022) Masyarakat sebagai aktor utama tidak ingin bertoleransi pada pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu dan terdampak birokrasi yang panjang. Keinginan-keinginan tersebut diharapkan mampu terpenuhi dalam waktu singkat untuk menjaga manajemen dan kualitas public service nya. (Pengestuti & Husniaty, 2021)

Penyelenggaraan good governance menjadi pokok utama untuk membereskan tata kelola pemerintahan dan berpengaruh dalam kesiapan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya (Lusiana & Najamudin, 2023). konsolidasi demokrasi serta good governance adalah bagian berharga pada pembangunan masyarakat disegala tingkatan termasuk desa (Hartati et al., 2023). Lokasi Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, masalah waktu pelayanan menjadi penghambat dan perlu ditinjau lagi serta waktu kehadiran aparatur desa dalam memberikan pelayanan belum tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Hal ini dapat menimbulkan proses pelayanan publik kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat tidak tercapainya tujuan dari good governance.

Perkembangan globalisasi berdampak positif jika digunakan dalam memajukan layanan kebutuhan warga desa. Masyarakat dengan mudah dan cepat mengakses informasi mengenai layanan publik, mengajukan permohonan dan keluhan serta mendapatkan respons dari pemerintah desa. (Mardinata et al., 2023). Pemanfaatan platform digital sebagai jaringan dua sisi yang memfasilitasi interaksi antara pengguna yang berbeda namun saling berkaitan akan memudahkan sistem public service yang efisien dan efektif (Sulistyanto et al., 2022). Sistem GoSuJo yang menjadi inovasi digital melalui website pemerintahan Desa Sumberjo. Website GoSuJo ini merupakan kumpulan halaman-halaman web yang ada dari domain yang berisikan segala berita mengenai Desa Sumberjo.

Pemberian pelayanan terbaik adalah perolehan dari unjuk kerja pemerintah desa demi menggapai goals sesuai standar pelayanan nasional dengan fokus pada pelayanan publik efektif serta efisien (Irma Rahmawati et al., 2023) Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini berjudul "Penguatan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Public Service oleh Aparatur Desa". Pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mencapai tujuan agar adanya peningkatan kualitas dan pemahaman aparatur desa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam memberikan public service secara optimal pada masyarakat melalui inovasi pemanfaat kemajuan teknologi. Dengan mewujudkan tata pemerintahan yang baik diharapkan kedepannya penerapan good governance mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap *public service* pada instansi pemerintahan.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini bersifat partisipatif. Pendekatan yang diterapkan adalah metode Partisipatory Rural Appraisal yang dikenal memiliki teknik operasional dan praktis dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat pedesaan secara partisipatif (Putri et al., 2020). Pendekatan PRA berfokus dengan melibatkan aparatur desa pada proses pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi, masalah dan kebutuhahn di lingkungan desa. Melalui partisipasi aktif dari aparatur desa, PRA memungkinkan pengumpulan data akurat dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu pengabdian juag mencakup konsep untuk memberikan penguatan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel bagi masyarakat di Desa Sumberjo.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan pada bulan Juli 2024 berlokasi di Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Sasaran utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah aparatur Desa Sumberjo. Metode kegiatan yang digunakan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi awal, perencanaan awal, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi mengenai penguatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja *public service* aparatur desa di Desa Sumberjo Blitar.

Pendekatan PRA ini terdapat 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini (Noor, 2011)



## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pemerintahan di Kantor Desa Sumberjo

Pemerintahan yang terlaksana dengan baik (*good governance*) adalah agenda reformasi yang bertujuan agar terbentuk pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan bervisi strategis.

Pelayanan di Desa Sumberjo sendiri masih belum sepenuhnya merambah ke dunia digital. Permasalahan waktu pelayanan menjadi penghambat dan perlu diperhatikan kembali. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kantor desa, harus menunggu kehadiran perangkat desa yang bersangkutan untuk menyelesaikan kebutuhan yang sedang diurus. Beberapa kepentingan masyarakat sebenarnya bisa menghubungi kantor desa melalui chat via *whatsapp* dan baru datang ke kantor desa untuk mengurus sisanya. Namun, pelayanan *online* via *whatsapp* ini belum digunakan untuk kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan untuk melayani secara *offline* harus menunggu ketika perangkat desa yang bersangkutan belum hadir, sehingga memakan waktu yang cukup lama akibat tidak tepat waktu serta pelayanan yang lambat. Faktor lain yang memperlambat proses pelayanan kepada masyarakat yakni aparatur desa yang saling lempar tugas. Hal tersebut menjadi faktor yang menghambat proses pelayanan publik kepada pengguna layanan, dan berakibat belum terwujudnya *good governance*.

### 2. Pelaksanaan Pengabdian

Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan *public service* berdasarkan hasil observasi di lapangan, menjadi alasan utama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian ini terlaksana dalam 5 tahapan, yaitu :

#### a. Sosialisasi Awal

Sosialisasi awal menjadi langkah pertama dari pelaksanaan pengabdian, yang mana tim pengabdian memperkenalkan bagaimana pengabdian ini akan dilaksanakan kepada Desa Sumberjo. Sosialisasi awal berguna untuk mencari gambaran atau observasi terkait kondisi

awal di lapangan seperti apa (Yudhya Mulyani et al., 2020). Tahap ini sangat krusial karena menjadi pondasi bagi keberhasilan rangkaian kegiatan pengabdian di Desa Sumberjo. Sosialisasi awal perlu dilakukan untuk menyesuaikan program dengan kondisi di lapangan serta membangun hubungan baik dengan Desa Sumberjo.

Selain itu, adanya koordinasi kegiatan dengan perangkat daerah setempat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Luaran yang didapatkan dari tahapan ini adalah Desa Sumberjo memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian dan diketahui bahwa Desa Sumberjo sendiri belum memiliki laman *website* yang dapat memberikan berbagai informasi dan layanan secara *online*. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Herwanto selaku sekretaris Desa Sumberjo. Pak Herwanto juga menyanggupi adanya pelaksanaan pengabdian di Desa Sumberjo dan siap untuk menerima serta membantu pelaksanaan kegiatan.



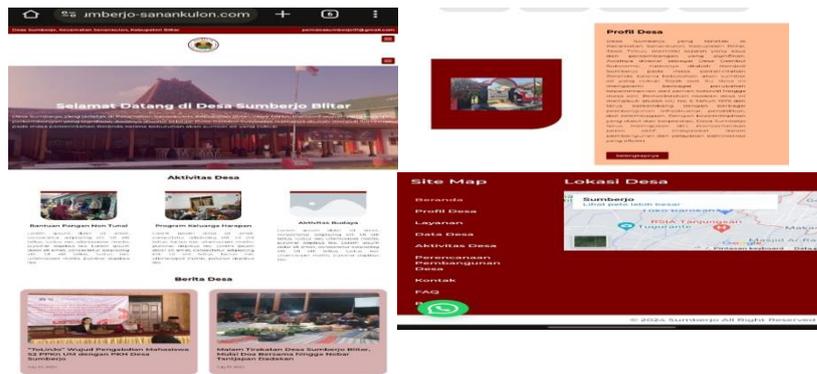
**Gambar 1.** Sosialisasi Awal

b. Perencanaan Awal

Tahap perencanaan awal melibatkan berbagai akitivitas yang bertujuan untuk memastikan program pengabdian dapat berjalan dengan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Afandi et al., 2022) Tim pengabdian mendata perangkat desa yang nantinya akan mengikuti kegiatan pendampingan terkait *website* yang telah dibuat oleh tim pengabdian. Selain itu, dalam perencanaan awal ini disampaikan juga sistematika tentang wawasan dan prinsip *good governance*.

c. Penyusunan Program

Penyusunan program dijalankan dengan membuat *website* untuk Desa Sumberjo. Gosujo (Go Sumberjo *Online*) merupakan *website* yang akan diberikan kepada Desa Sumberjo dari tim pengabdian. Gosujo ini nantinya akan memberikan berbagai fitur informasi serta berita kegiatan yang akan atau sudah dijalankan sehingga keterbukaan informasi dapat terlihat. Tidak hanya itu, layanan masyarakat bisa diberikan melalui *website* Gosujo, sehingga lebih praktis dan mudah.



Gambar 2. Website Gosujo

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2024 yang dihadiri oleh 25 perangkat Desa Sumberjo. Kegiatan dilaksanakan di balai desa Sumberjo dan berlangsung di jam 10.00. Sebelum memasuki kegiatan inti, kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Bapak Sunari selaku kepala desa. Selanjutnya, pengabdian masyarakat terkait “Penguatan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja *Public Service* Aparatur Desa” disampaikan oleh Firdausi Dhulhijjahyani, S.Pd., M.AP, yang merupakan ketua pelaksana dan juga pemateri. Sebelum penyampain materi, diberikan beberapa soal *pre-test* kepada para aparat desa. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman aparat desa terhadap pelayanan kepada masyarakat yang baik atau *good governance*. Proses pengerjaan *post-test* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Pengerjaan Pre-test

Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan apa yang dimaksud dari transparansi dalam konteks *good governance*. Kemudian mengapa akuntabilitas penting dalam penerapan *good governance*, maksud dari *rule of law* dalam *good governance*, urgensi penerapan prinsip *good governance* bagi aparat desa serta apa yang dimaksud dari kinerja *public service*. Hasil *pre-test* yang telah dijawab oleh aparat desa nantinya dapat menjawab seberapa paham aparatur desa tentang *good governance*. Setelah pengisian selesai, anggota pengabdian memberikan penilaian dari hasil masing-masing

aparatus desa. Hasil *pre-test* yang telah dilaksanakan, aparat desa telah paham mengenai *good governance* sebesar 50%.

Setelah kegiatan *pre-test* selesai, dilanjutkan penyampaian materi prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Firdausi Dhulhijjahyani, S.Pd., M.AP. Saudari Firdausi menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik, yang mana di Indonesia sendiri pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis sebab perbaikan pelayanan publik yang ada di negara ini cenderung hanya jalan ditempat. Sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.



Gambar 4. Penyampaian Materi

Pada pemaparan materi tersebut, saudari Firdausi menjelaskan pengertian pelayanan publik yang merupakan proses pemberian pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : a) pelaksanaan pelayanan; b) pengelolaan pengaduan masyarakat; c) pengelolaan informasi; d) pengawasan internal; e) penyuluhan kepada masyarakat dan f) pelayanan konsultasi.

Saudari Firdausi memberikan penjelasan terkait paradigma serta prinsip-prinsip dari *good governance*. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan uji *post-test* dengan pertanyaan yang sama seperti *pre-test* untuk menguji seberapa paham dengan materi yang telah disampaikan.



Gambar 5. Pengerjaan *post-test*

Pengerjaan *post-test* diambil 3 nilai terbaik dan diberikan hadiah sebagai penghargaan atas jawaban yang telah diberikan. Kegiatan terakhir, pemberian link *website* Gosuju kepada kepala Desa

Sumberjo untuk digunakan dalam pelayanannya kepada masyarakat sehari-hari.

e. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan capaian *output* dari program kerja yang direncanakan (Mustofa, 2021). Evaluasi menjadi proses penilaian terhadap pelaksanaan program kerja tim pengabdian untuk mengukur sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pengabdian sehingga *website* yang diberikan digunakan dengan baik. Hasil *post-test* yang telah terlaksana memberikan hasil bahwa aparaturnya telah paham terkait prinsip-prinsip dari *good governance*.

3. Kendala Pelaksanaan

Kendala yang muncul selama kegiatan berlangsung berhubungan dengan eksternal yaitu ketersediaan LCD dan *sound system* yang membutuhkan waktu cukup lama, membuat kegiatan tidak terlaksana sesuai *timeline*. Undangan yang diberikan kepada kantor desa sebanyak 40 peserta, akan tetapi ketika hari pelaksanaan yang hadir hanya 25 peserta saja. Pelaksanaannya juga terganggu oleh adanya warga yang datang ke kantor desa untuk mengurus kepentingannya, sehingga aparaturnya harus bolak balik untuk melayani.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan pemerintahan Desa Sumberjo menjadi salah satu upaya pemajuan dari pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, yang tentunya sangat diperlukan saat ini. Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian adanya *website* Gosujo yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan secara *online* serta keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Sumberjo. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran yakni pemerintah setempat diharapkan dapat mendukung kegiatan pengabdian serupa dengan sumber daya yang memadai serta untuk kegiatan selanjutnya perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pengabdian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan untuk Universitas Negeri Malang yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat, kepada seluruh aparaturnya Desa Sumberjo yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti serangkaian kegiatan pengabdian, serta kepada seluruh perangkat Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengabdian sehingga dapat berjalan dengan lancar.

**REFERENSI**

- Adam, A., Siregar, N. S. S., Matondang, A., Angelia, N., & Lubis, Y. A. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Good governance Tingkat Desa Di Desa Aras Kabu Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5713>.
- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D., Nurdianah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Dikti Keagamaan Islam. <http://diktis.kemenag.go.id>
- Cahyadi, A. (2016). Penerapan Pelayanan Publik dalam Good Governance (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance) di Kecamatan Sukolilo Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2).
- Hartati, A., Palopa, R., & Mahmud, S. (2023). Pendampingan Desa Dalam Penguatan Demokrasi Dan Good Governance Di Desa Sayambongin Kec. Nambo Kab. Banggai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(5). <https://doi.org/10.59818/JPM>
- Ikbal, M., Barisan, Saifullah, & Alwi, Y. (2023). Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Wedana*, 9(1).
- Irma Rahmawati, Hadi Juwanda, Ginanjar, S. E., Anwar, & Iin Surtiah. (2023). Sosialisasi Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Pasir Impun Kota Bandung. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 58–66. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1102>
- Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, IX(2).
- Lusiana, N., & Najamudin, ; (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 304–316.
- Mardinata, E., Dwi Cahyono, T., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>.
- Mustofa, I. (2021). Manajemen Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Evaluasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Pemberdayaan Umat Stai Darussalam Nganjuk). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1). <https://pondokkrempyang.org/yiga/sejarah/>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Pengestuti, D. C., & Husniaty, R. (2021). Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kelurahan Limo Depok. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 4, Issue 1). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- Pramudita, P., Putri, A. U., & Hendarmin, R. (2024). Pengaruh Good Government Governance dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Betung Selatan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 5904–5914.

- Pujiyono, B., Ushud, A. A. A., Windarto, W., & Logiana, A. D. (2023). Penerapan E Government Bagi Aparat Desa Wanagiri Menuju Desa Digital. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 322–334. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7455>
- Putri, A., Rahmah, E. M., Rifanela, H., Qonita, N. B., & Tawfiqurrohman. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra) Dalam Menangani Permasalahan Lingkungan di Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 378–385.
- Santati, P., Zunaidah, Febriana Kartasari, S., & Meitisari, N. (2022). Peningkatan Kapabilitas Perangkat Desa Melalui Pelatihan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Ulak Kembahang II Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 5(3). <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/>
- Sulistiyanto, A., Muhamad, P., Dwinarko, & Sjafrizal, T. (2022). Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasis Website. *ABDIRA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 117–128.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Yudhya Mulyani, E., Ummanah, Pambudi, A., Rachmat, I., Fuad, A., Tarigan, M., Kusuma Among Praja, A., Nefianto, T., Saillah, I., Yuwono, I., Kurniawan, A., Wijaya, R., Mega Nugroho, T., Saptadinata, A., & Ichwanudin, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Program Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM) Tematik Di Wilayah Sulawesi Tengah. *Jurnal Abdimas*, 6(3), 160.